



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ENNY IROH HAYATI
- Jabatan** : KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
- NHK** : 954582

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **792.400.000**

- Tanah Seluas 276 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/190 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 250.000.000
- Tanah Seluas 935 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 150.000.000
- Tanah Seluas 42 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 2.400.000
- Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 50.000.000
- Tanah Seluas 860 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 80.000.000
- Tanah Seluas 1585 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 150.000.000
- Tanah Seluas 665 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **194.000.000**

- MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA/MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE/MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000
- MOTOR, HONDA EIF02N12M2 A/T / SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	239.121.083
F. HARTA LAINNYA	Rp.	30.200.000
Sub Total	Rp.	1.280.721.083
III. HUTANG	Rp.	282.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	998.721.083

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.